

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2017

Nelsalonica Tria Pavecta¹ Noviansyah Rizal² Subani³
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
nelsa.lonica31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari pada pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah khususnya pada SKPD bukan penghasil yang sangat jarang dilakukan. Penelitian tentang efektivitas dan efisiensi lebih banyak dilakukan pada tingkat daerah maupun SKPD penghasil. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2017?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tingkat efektivitas selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan rata-rata pada kriteria yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sudah cukup baik. Sedangkan, untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan rata-rata berada pada kriteria yang kurang efisien. Hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat merupakan organisasi non-penghasil, itu artinya organisasi tersebut hanya melakukan transaksi pengeluaran saja.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract

This study is based on measuring the effectiveness and efficiency of local financial management, especially in SKPD is not a very rare producer. Research on effectiveness and efficiency is mostly done at the local level and SKPD producer. The problem raised in this research is how the level of effectiveness and efficiency of local financial management at the Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang year 2015-2017?. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and efficiency of local financial management at Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang for the fiscal year 2015-2017. The method of analysis used in this research is descriptive analysis with quantitative approach. This study uses data collection techniques that is by documentation. The results show that for the effectiveness level during 2015 to 2017 the overall average on effective criteria. This indicates that the management of local finance in the Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat is good enough. Meanwhile, for the efficiency level in 2015 until the year 2017 overall the average is in the criteria less efficient. That is because the Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat is a non-producer organization, that means the organization is only doing expense transactions only.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Regional Financial Management

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan negara, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Asas-asas tersebut meliputi asas spesialisitas, asas universalitas, asas tahunan, asas kesatuan, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pernyataan tersebut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien harus dilakukan secara optimal, karena sering terjadi realisasi anggaran tidak sesuai dengan target. Konsep efektivitas dan efisiensi pada umumnya digunakan oleh organisasi penghasil yaitu dengan menggunakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran daerah. Sedangkan, organisasi dalam penelitian ini yaitu organisasi non-penghasil, konsep efektivitas dan efisiensi yang digunakan berbeda dengan konsep pada organisasi penghasil. Konsep efektivitas dan efisiensi dalam penelitian ini menggunakan anggaran belanja daerah. Konsep efektivitas menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja (*outcome*) dengan target anggaran belanja (*output*) dikalikan seratus dalam bentuk prosentase. Sedangkan konsep efisiensi menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung (*output*) dengan realisasi anggaran belanja (*input*) dikalikan seratus dalam bentuk prosentase.

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan untuk penelitian tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, antara lain dilakukan oleh : (Rondonuwu, Ritno H. dkk, 2015), penelitian tersebut menggunakan konsep efisiensi yaitu dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah, sedangkan konsep efektivitas yang digunakan yaitu membandingkan antara realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Manopo, Novlie. dkk, 2014) penelitian tersebut menggunakan konsep efisiensi yakni membandingkan antara target PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Sedangkan konsep efektivitas yang digunakan yakni membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Penelitian tersebut dilakukan karena perkembangan pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pangkey, Imanuel; Pinatik (2015) menggunakan konsep efektivitas perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung, sedangkan konsep efisiensi membandingkan antara target anggaran belanja tidak langsung dengan realisasi anggaran belanja tidak langsung. Penelitian dilakukan karena perkembangan pertumbuhan anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, adakalanya mengalami peningkatan adakalanya pula mengalami penurunan.

Fahlevi, Heru; Ananta (2015) menggunakan Konsep efisiensi yang membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja, sedangkan konsep efektivitas membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung. Penelitian dilakukan karena Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami permasalahan adanya alokasi anggaran belanja tidak langsung lebih besar hingga di atas 60%. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah konsep efektivitas dan efisiensi, tempat penelitian, dan periode penelitian. Konsep efektivitas dan efisiensi dalam penelitian ini berdasar pada organisasi non-penghasil, yaitu menggunakan

anggaran belanja daerah. Tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat merupakan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah. Pemilihan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai objek penelitian didasarkan pada segi pengelolaan keuangan daerah. Alasan peneliti tertarik di bidang pengelolaan keuangan, khususnya tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena pada unit kerja tersebut memiliki perkembangan pertumbuhan penerimaan APBD dan pengeluaran daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian terhadap persoalan-persoalan dalam bentuk kenyataan-kenyataan masa sekarang dari suatu populasi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci analisisnya setelah meneliti keadaan di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Obyek penelitian Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2017 adalah efektivitas dan efisiensi.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Rasio Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, 2015

Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
- Menganalisis data berdasarkan variabel penelitian
- Menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

d. Hasil analisis data diukur tingkat efektivitas dan efisiensinya sesuai dengan pedoman Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 yang mengkategorikan efektivitas ke dalam lima tingkat yaitu sebagai berikut:

- a) Di atas 100% = Sangat Efektif
- b) 90% - 100% = Efektif
- c) 80% - 90% = Cukup Efektif
- d) 60% - 80% = Kurang Efektif
- e) Kurang dari 60% = Tidak Efektif

Sedangkan kategori efisiensinya juga dibagi menjadi lima tingkat yaitu sebagai berikut:

- a) Di atas 100% = Tidak Efisien
- b) 90% - 100% = Kurang Efisien
- c) 80% - 90% = Cukup Efisien
- d) 60% - 80% = Efisien
- e) Kurang dari 60% = Sangat Efisien

e. Pembahasan dan menyimpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas cenderung lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Halim, Abdul; Kusufi (2014:130) menyatakan bahwa efektivitas merupakan tolok ukur berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah bekerja dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program kerja atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas menghitung hasil akhir dari suatu pelayanan dihubungkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja dibandingkan dengan target anggaran belanja dikalikan seratus dalam bentuk persentase. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Di atas 100% = Sangat Efektif
- b) 90% - 100% = Efektif
- c) 80% - 90% = Cukup Efektif
- d) 60% - 80% = Kurang Efektif
- e) Kurang dari 60% = Tidak Efektif

Dengan menggunakan formulasi efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 3

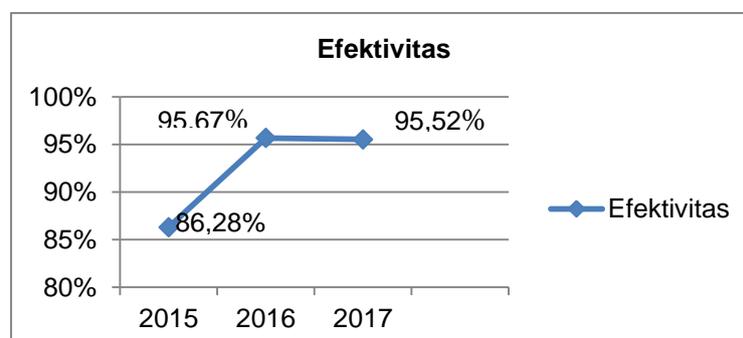
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Efektivitas	Keterangan
2015	2.796.037.227.00	3.240.523.723.00	86,28%	Cukup Efektif
2016	3.732.911.134.00	3.901.745.197.00	95,67%	Efektif
2017	4.406.375.921.00	4.613.000.000.00	95,52%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel di atas menjelaskan hasil perhitungan rasio efektivitas dalam kurun waktu tiga tahun anggaran yang tertera di kolom keempat, sedangkan di kolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Pada kolom kedua adalah realisasi anggaran belanja yang dibagi dengan target anggaran belanja yang terletak pada kolom ketiga. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 berada pada tingkat cukup efektif dan efektif. Pada tahun 2015 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berada pada pengelolaan keuangan daerah yang cukup efektif. Sedangkan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berada pada pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Namun, jika diperhatikan, rasio tingkat efektivitas Tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat cukup baik dalam mengelola keuangannya. Sedangkan rasio tingkat efektivitas pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu menjadi 95,67% untuk Tahun 2016 dan 95,52% untuk Tahun 2017, hal ini berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat semakin baik dalam mengelola keuangannya. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan pada prosentase 92% dan dapat dikatakan efektif. Rasio efektivitas yang dalam kategori 90%-100% mempunyai arti bahwa belanja daerah tidak melebihi anggaran belanja yang telah direncanakan oleh pihak Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Semakin besar nilai rasio efektivitas keuangan maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Pola perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Grafik Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015-2017

Sumber: Data Diolah, 2018

Gambar di atas menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 yang dihasilkan dari perhitungan rasio efektivitas. Bilangan pada garis vertikal menunjukkan prosentase tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan bilangan pada garis horizontal menjabarkan ketiga tahun anggaran yang diteliti yaitu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Pada gambar di atas juga terlihat bahwa prosentase tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 cenderung meningkat yang berarti bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat semakin baik.

Efisiensi lebih menitik beratkan pada tingkat daya guna yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Halim, Abdul; Kusufi (2014:129) berpendapat bahwa efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Lebih besar output dibanding input, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi suatu organisasi. Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output (*cost of output*). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja terhadap target anggaran belanja dikalikan seratus dalam bentuk persentase.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- f) Di atas 100% = Tidak Efisien
- g) 90% - 100% = Kurang Efisien
- h) 80% - 90% = Cukup Efisien
- i) 60% - 80% = Efisien
- j) Kurang dari 60% = Sangat Efisien

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Efisiensi	Keterangan
2015	2.796.037.227.00	2.796.037.227.00	100%	Kurang Efisien
2016	3.732.911.134.00	3.732.911.134.00	100%	Kurang Efisien
2017	4.406.375.921.00	4.406.375.921.00	100%	Kurang Efisien

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel di atas menjelaskan hasil perhitungan rasio efisiensi dalam kurun waktu tiga tahun anggaran yang tertera di kolom keempat, sedangkan di kolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Pada kolom kedua adalah realisasi anggaran belanja langsung yang dibagi dengan realisasi anggaran belanja yang

tertera pada kolom ketiga. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebesar 100%. Berdasarkan perhitungan dari formulasi di atas, maka rata-rata keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dinyatakan kurang efisien, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90% dan termasuk dalam kategori yang kurang efisien. Semakin besar nilai rasio efisiensi keuangan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menyangkut perbandingan output dan input pelaksanaan program kerja atau kegiatan pelayanan publik.

Efektivitas merupakan tolok ukur berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah bekerja dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas dari anggaran belanja di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dan masih dalam kriteria cukup efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka kurang dari 90%. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi pada tahun 2016 dan 2017 tingkat efektivitas anggaran belanja di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dan termasuk dalam kriteria efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dinyatakan efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan angka 92%. Dengan demikian tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang dinyatakan efektif. Hal ini berarti sistem pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang telah cukup baik. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 semua program dan kegiatan sudah dijalankan dengan hasil analisis tingkat efektivitas pada pelaksanaan belanja langsung rata-rata sebesar 92% yang termasuk dalam kriteria efektif. Berikut contoh program atau kegiatan rutin setiap tahun yang dijalankan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang:

Tabel 5

Program dan Kegiatan dalam Belanja Langsung yang Dijalankan

1.	Program Fasilitas Kegiatan Keagamaan	1. Peringatan hari-hari besar keagamaan: a. Peringatan maulud nabi b. Peringatan isra' mi'raj
----	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> c. Peringatan nuzulul qur'an d. Peringatan hari santri e. Kegiatan ramadhan dan idul fitri: <ul style="list-style-type: none"> a) Safari ramadhan b) Buka puasa bersama c) Sholat tarawih d) Pemberian bingkisan hari raya kepada alim ulama e) Kegiatan takbir keliling idul fitri f) Kegiatan halal bi halal g) Pengiriman ulama acara halal bi halal dengan bapak gubernur f. Kegiatan idul adha: <ul style="list-style-type: none"> a) Kegiatan takbir keliling idul adha b) Sholat idul adha c) Pengumpulan dan penyaluran hewan ternak dan daging kurban d) Silaturahmi dan ramah tamah g. Peringatan tahun baru islam: <ul style="list-style-type: none"> a) Khotmil qur'an tahun baru islam b) Silaturahmi dan istighosah c) Gebyar kesenian islam d) Pengajian umum h. Perayaan natal i. Perayaan paska j. Perayaan natal dan tahun baru <p>2. Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji</p> <p>3. Fasilitas lomba keagamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penataran dewan hakim MTQ b. Pelaksanaan MTQ kabupaten lumajang c. Pengiriman peserta MTQ Jawa Timur d. Pengiriman peserta MTQ Nasional e. Pemberian seragam MTQ Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan Nasional f. Pawai ta'aruf pembelian trofi bagi yang berprestasi g. Pembinaan khotmil/hafidz qur'an h. Parade patrol i. Lomba kegiatan religi <p>4. Fasilitas kegiatan istighosah, do'a bersama dan pembinaan tokoh agama:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Istighosah c) Do'a bersama d) Pembinaan takmir masjid e) Penataran mubaligh f) Pembinaan mental karyawan
--	--	--

		g) Pengajian manaqib h) Safari sholat Jum'at
2.	Program Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial	1. Fasilitas kegiatan pemberian bantuan dan silaturahmi masyarakat kurang mampu: a. Silaturahmi dengan anak yatim b. Bingkisan untuk anak yatim c. Bantuan sembako bagi gakin/tukang becak/pasukan oranye d. Bantuan sembako bagi guru PAUD 2. Fasilitas kegiatan khitan dan nikah massal masyarakat kurang mampu: a. Kegiatan khitan massal b. Kegiatan nikah massal
3.	Program Fasilitas Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan	1. Peningkatan pengelolaan pondok pesantren: a. Pembinaan manajemen pondok pesantren dan TPA 2. Peningkatan kegiatan pendidikan dan kebudayaan bidang keagamaan: a. Lomba keagamaan b. Pembinaan forum komunikasi pondok pesantren/guru ngaji

Sumber: Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input, (Halim, Abdul; Kusufi, 2014:129). Lebih besar output dibanding input, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi suatu organisasi, (Halim, Abdul; Kusufi, 2014:129). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output (cost output). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Karena efisiensi lebih menitikberatkan kepada daya guna yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 berada pada persentase 100% dan hal tersebut dapat dinyatakan dalam kategori yang kurang efisien. Hal ini dikarenakan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat merupakan organisasi non-penghasil, jadi organisasi tersebut hanya melakukan transaksi pengeluaran saja. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2014), Rondonuwu (2015), South dkk (2016), Syahril dan Ilat (2016), dan Siregar dan Syam (2017) yang menyatakan bahwa rata-rata nilai rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada instansi yang ditelitinya mencapai tingkat yang kurang efisien.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 rata-rata berada pada

tingkat efektif. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata hasil perhitungan yang menunjukkan persentase sebesar 92%. Sedangkan secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan rata-rata 100%. Hal ini berarti tingkat efisiensi pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dinyatakan kurang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- A Siregar, Fachrul., dan Fazli Syam BZ. 2017. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 4:93–106.
- Fahlevi, Heru., dan Muhammad Reza Ananta. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung (Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 1, No. 2:37–44.
- Fahrianta, Riswan Yudhi., dan Viani Carolina. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 13, No. 1:57–72.
- Habibah, Nur. 2014. Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013.
- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Hariadi, Pramono. dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. BPFE: Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. 1996.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 3. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Manopo, Novlie. dkk. 2014. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. 1–14.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. CV ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi., dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Pangkey, Imanuel., dan Sherly Pinatik. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4:33–43.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2010.
- Ratmono, Dwi., dan Mahfud Sholihin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 2. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Rondonuwu, Ritno H. dkk. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4:23–32.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9:1689–1699.
- Suoth, Novelya. dkk. 2016. Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 4, No.1:613–622.
- Syahril, Mega F., dan Ventje Ilat. 2016. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 3:640–649.
- Trianto, Anton. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. 65–77.
- Untari, Rusita. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang.